

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH DAN  
KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN TERHADAP TRANSPARANSI  
INFORMASI KEUANGAN DAERAH VIA WEBSITE  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**

*Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Sarjana Ekonomi pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**Sophi Dezalinda**

**2018/18043065**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH DAN  
KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN TERHADAP TRANSPARANSI  
INFORMASI KEUANGAN DAERAH VIA WEBSITE  
(studi empiris pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019-2021)

Nama : Sophi Dezalinda  
BP/ NIM : 2018/18043065  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

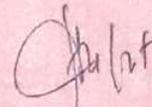
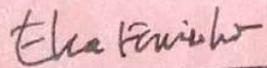
Padang, Januari 2024

Disetujui oleh :

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi S-1

Pembimbing



Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si. Ak  
NIP. 19710522 200003 2 001

Mayar Afriyenti, SE., M.Sc  
NIP. 1984013 200912 2 005

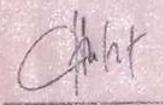
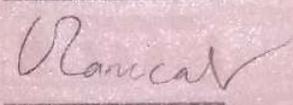
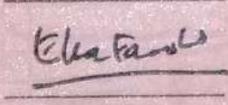
**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH DAN  
KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN TERHADAP TRANSPARANSI  
INFORMASI KEUANGAN DAERAH VIA WEBSITE  
(studi empiris pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019-2021)**

**Nama : Sophi Dezalinda  
BP/ NIM : 2018/18043065  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**

**Padang, Januari 2024**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tim Penguji Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>1</b>	<b>Ketua</b>	<b>: Mayar Afriyenti, SE., M.Sc</b>	
<b>2</b>	<b>Anggota</b>	<b>: Vanica Serly, SE., M.Si</b>	
<b>3</b>	<b>Anggota</b>	<b>: Dr. Eka Fauzihardani, SE., M. Si. Ak</b>	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sophi Dezalinda  
NIM/Thn Masuk : 18043065/ 2018  
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi/ 03 Desember 1999  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Jorong Kumpang Caniago, Ganggo Hilia, Kecamatan  
Bonjol, Kabupaten Pasaman  
No. Hp : 0822 8650 4192  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Dan  
Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi  
Keuangan Daerah Via Website

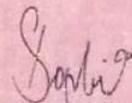
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh pembimbing, Tim penguji dan Ketua Jurusan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis /skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2024

Yang menyatakan,



Sophi Dezalinda  
NIM. 18043065

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Dan Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Transparansi merupakan isu kunci dalam pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas kepada publik diperlukan untuk pemerintaan yang demokratis guna mendorong transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi tentang keuangan dan non keuangan. Peningkatan transparansi sangat penting dalam rangka fungsi pengawasan, pencegahan tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan menimbulkan gangguan. Ini menyebabkan pentingnya transparansi informasi pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses jalannya pemerintahan.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya

penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

- Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
- Ibu Mayar Afriyenti, S.E, M.Sc., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- Ibu Vanica Serly, S.E, M.Si., dan Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak., yang telah menjadi penelaah dan penguji dalam seminar proposal dan sidang skripsi penulis.
- Ibu Fiola Finomia Honesty, S.E, M.Si., selaku pembimbing akademik penulis.
- Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Padang, Januari 2024

**SOPHI DEZALINDA**

NIM: 18043065

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusu' selain do'a yang terucap dari orang tua. Terimakasih dan sayang kepada Ibu Wella Kosma Ilinda dan Bapak Afdizal atas semua do'a dan dukungannya.
- Abang dan adik-adik saya Thio Afdi M, Vega Hazenda, Marsha Abilla, dan M. Vetho Syarif yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, terimakasih dan sayang untuk kalian.
- Keponakan saya yang menjadi salah satu alasan dan moodbooster saya Dzuhairi (Adzu)
- Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
- Sahabat-sahabat saya Olivia Putri, Latifah Annisa Zuren, Sasa Sabila, Hayatun Nufus, Isra Rahwa Noviani, Risma Febriani, dan teman-teman yang selalu memberi saya motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

- Diri sendiri Sophi Dezalinda yang sudah ingin bertahan meski sempat putus asa tapi berkat berkah dari Allah SWT dan do'a kedua orang tua akhirnya dapat menyelesaikan ini sampai akhir.

## **ABSTRAK**

**Dezalinda, Sophi, 2024.** “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2021)”. Skripsi Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Padang. Pembimbing Mayar Afriyenti, S.E., M. Sc.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan data aktual mengenai dampak pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website di Indonesia. Berdasarkan aksesibilitas perolehan informasi keuangan daerah dengan observasi penelitian selama tiga tahun, penelitian ini melihat transparansi informasi keuangan pada website pemerintah di 34 provinsi di Indonesia. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji penelitian ini.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara signifikan meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah via website. Namun, untuk variabel belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website. Hasil ini mendukung teori sinyal yang menyatakan bahwa tingginya pendapatan asli daerah menandakan bahwa pemerintah berhasil melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan internal maupun eksternal, untuk meningkatkan transparansi data keuangan di website pemerintah daerah ke depannya.

**Kata Kunci: Transparansi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah,  
Kompleksitas Pemerintahan**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....	12
A. Kajian Pustaka .....	12
1. Teori Sinyal (Signalling Theory).....	12
2. Transparansi .....	13
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	16
4. Pendapatan Asli Daerah .....	18
5. Belanja Daerah .....	21
6. Kompleksitas Pemerintahan .....	21
B. Penelitian Relevan.....	22
C. Pengembangan Hipotesis.....	26
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via <i>Website</i> .....	26
2. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via <i>Website</i> .....	26

3. Pengaruh Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via <i>Website</i> .....	27
D. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Jenis dan Sumber Data.....	30
C. Populasi dan Pengambilan Sampel.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Variabel Penelitian.....	33
F. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	37
G. Definisi Operasional Variabel.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Keterbatasan Penelitian.....	56
C. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	66

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isu kunci dalam pemerintahan yang demokratis adalah transparansi. Akuntabilitas kepada publik diperlukan untuk pemerintahan yang demokratis guna mendorong transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi tentang anggaran dan keuangan. Peningkatan transparansi sangat penting dalam rangka fungsi pengawasan, pencegahan tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan menimbulkan gangguan.

Berkurangnya minat dalam urusan kehidupan politik dan administrasi berakar pada warga di Portugis yang merasa jauh dan sering dikucilkan dari proses, dengan pembuatan kebijakan dikompromikan oleh kabut transparansi yang rendah, maladministrasi atau korupsi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap lembaga pemerintah, menjadi tidak mau menerima tindakan yang dilakukan jika tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan nyata masyarakat. Hal serupa juga ditekankan oleh Piotrowski dan Bertelli (2010) dalam Krah *et al* (2020), dengan alasan bahwa warga sering mengaitkan masalah politik dan administrasi dengan kerahasiaan dan ketidakjelasan. Ini yang menyebabkan pentingnya transparansi pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses jalannya pemerintahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembuat standar akuntansi dan badan profesional telah mengeluarkan rekomendasi yang bertujuan untuk

meningkatkan transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan yang disediakan oleh entitas pemerintah. Hal ini menyebabkan pelaporan keuangan sebagai akuntabilitas dan transparansi publik menjadi penting.

Transparansi disikapi di Indonesia pada awal era reformasi tahun 1998 akibat skeptisisme publik terhadap pemerintah. Kemerosotan ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi saat ini meningkatkan tuntutan masyarakat akan tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam berbagi informasi pemerintah. Meningkatnya keinginan publik terhadap transparansi menjadikan semakin besar pula tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya daerah.

Setelah reformasi ini, Indonesia menerapkan strategi otonomi daerah yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan pemerintahannya sendiri, termasuk kepentingan penduduknya sendiri sesuai dengan Undang-undang yang ada. Peraturan ini tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah RI No. 23 Tahun 2014. Pentingnya transparansi bagi publik, termasuk keuangan dan informasi lainnya, sangat penting dalam pengaturan otonomi daerah di Indonesia (Adiputra, Utama, & Rossieta, 2018).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyatakan bahwa semua badan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib mempublikasikan informasi

publik atas setiap kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat luas secara teratur dan akurat, baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Undang-undang ini juga mengatur bahwa pemerintah wajib menyampaikan informasi kepada publik dalam format yang mudah diakses dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Menyusul terbitnya peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Instruksi No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TPAD). Pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini untuk membuat menu konten atau portal dengan istilah TPAD pada website resmi daerah masing-masing. Mendukung pelaksanaan transparansi, sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Regulasi yang ada dapat mengindikasikan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Seiring dengan kemajuan teknologi internet, website dapat dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi yang paling strategis kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pengelolaan yang transparan. Berdasarkan *World Bank* (2003) dalam Mya dan Komarrudin (2014), diyakini bahwa mempublikasikan data keuangan secara online akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sekaligus menurunkan asimetri informasi antara publik dan pemerintah.

Menurut Styles & Tennyson (2007), internet diartikan sebagai media yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan menjadi sasaran hemat biaya bagi pemerintah dalam menyebarkan informasi baik keuangan maupun non-keuangan pemerintah dalam bentuk pelaporan online. Puspita dan Martani (2012) menekankan perlu adanya transparansi kinerja keuangan melalui website. Karena biaya penggunaan teknologi relatif murah dan mudah dalam menjalankan kegiatan entitas ekonomi jika dibandingkan secara konvensional dan manual.

Publik dapat mengetahui potensi daerah dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan serta informasi keuangan melalui *website* pemerintah yang merupakan bentuk penerapan *e-government*. *Website* dapat diakses oleh siapa pun, hal ini menunjukkan adanya bentuk transparansi. Penggunaan *website* oleh pemerintah mulai dilakukan di Indonesia, hal ini ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 serta diperjelas dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Sejak saat itu, hampir seluruh pemerintah di Indonesia sudah memiliki *website* resmi, namun belum memanfaatkan secara maksimal. Pemerintah daerah sebaiknya lebih memberikan perhatian terhadap laman *website* resmi agar pengungkapan informasi baik keuangan maupun non-keuangan dapat diakses secara tepat dan akurat oleh masyarakat sehingga pemanfaatan *e-government* dapat optimal dilakukan.

Di Indonesia, transparansi melalui *website* sudah dilakukan. Sejauh ini masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia sudah memiliki *website*

resmi. Namun, pemanfaatannya oleh pemerintah belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data hasil survey yang didapatkan di halaman layanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 mengenai penggunaan portal *website* yang digunakan seluruh pemerintah di Indonesia sebagai perwujudan *e-government*. Indonesia meraih peringkat 88 dari 193 negara dalam penggunaan portal resmi pemerintah dan menduduki peringkat 57 perihal partisipasi masyarakat terhadap kebutuhan akan informasi publik. Direktorat Jenderal Bina Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan observasi pencapaian target Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang pelaksanaan peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan mendapati hasil masih terdapat daerah provinsi dengan tingkat capaian 0% (Dewi, viona 2019).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui transparansi informasi keuangan pemerintah melalui situs pemerintah daerah. Transparansi informasi keuangan daerah mengacu pada tingkat keterbukaan dan keterjangkauan informasi terkait keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah dapat mencakup: (1) peraturan dan kebijakan, (2) sistem pelaporan keuangan, (3) akuntabilitas dan pengawasan, (4) budaya transparansi, (5) literasi keuangan masyarakat, dan (6) penggunaan teknologi informasi.

Penelitian yang meneliti transparansi informasi keuangan daerah melalui situs pemerintah seperti penelitian Verawaty (2017) dengan judul determinan transparansi informasi keuangan daerah melalui *e-government*

pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Penelitian Saputri dan Yuliantoro (2019) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via *website* menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah via *website*.

Penelitian Medina (2012) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Pengungkapan informasi daerah di internet adalah informasi yang tidak ditutupi baik dalam bentuk laporan keuangan, informasi non-keuangan maupun informasi lainnya yang dibutuhkan publik mengenai hasil aktivitas pemerintah.

Pendapatan asli daerah ialah pendapatan diperoleh oleh daerah yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kinerja daerah dalam menghasilkan uang sendiri ditampilkan oleh PAD. Informasi lebih lanjut dengan dukungan kuat akan diberikan oleh pemerintah yang layak. Hasil penelitian Medina (2012) dan Verawaty (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih selama periode yang bersangkutan merupakan belanja daerah. Tujuan belanja daerah adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat keterbukaan informasi pelayanan publik Pemerintah Daerah meningkat secara proporsional dengan belanja daerah. Hal ini selaras dengan pernyataan Christiaens (1999) dalam Fawziah dan Fefri (2020) bahwa kinerja tinggi menunjukkan manajemen publik yang efektif. Hasil penelitian oleh Kadek dkk (2015) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintahan.

Menurut Ingram (1984) dalam Ningsih RF (2018) variabel kompleksitas pemerintahan (yang diproksikan dengan populasi penduduk) memotivasi pemerintah kota untuk meningkatkan pengungkapan dalam rekening keuangan. Besarnya permintaan informasi pelayanan publik di setiap daerah tercermin dari jumlah penduduk. Penelitian Guillamon *et al* (2011) bahwa variabel populasi penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan.

Seiring dengan penggunaan teknologi informasi pada saat ini sudah sangat pesat yaitu internet, peneliti belum melihat pemerintah memaksimalkan peran internet dalam pengungkapan informasi keuangan pada *website* resminya. Peneliti ingin menguji kembali secara empiris pada variabel pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan sebagai variabel bebas, dalam mempengaruhi transparansi

informasi keuangan daerah via *website*. Penelitian ini dilakukan pada *website* resmi pemerintah provinsi di Indonesia dengan meneliti informasi keuangan tahun 2019-2021.

Peneliti mengambil objek tersebut karena pemerintah masih kurang memperhatikan *website* resminya atau belum memaksimalkan pemanfaatan *website*, hanya sekedar memenuhi kewajiban mempunyai *website* yang mana informasi yang disajikan masih terlihat memilih-milih informasi yang ingin diungkapkan yakni informasi yang dianggap aman untuk disajikan. Selain itu, dalam laporan lembaga *transparency international* (TI) merilis data indeks persepsi korupsi 2021 untuk IPK Indonesia tercatat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100 pada 2021. *Transparency International* melibatkan 180 negara dalam survei IPK-nya. Skor 0 artinya tersebut sangat korupsi, sebaliknya skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Hal ini terlihat bahwa Indonesia belum cukup bersih dari tindakan korupsi, sehingga transparansi informasi pemerintah penting untuk dikaji kembali dengan menguji faktor yang terindikasi memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi pemerintah provinsi di Indonesia.

Penelitian ini mengambil referensi dari penelitian yang dilakukan oleh (Fawziah & Fefri, 2020) dan (Dewi, 2019). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah populasi dan tahun pengamatan penelitian yang digunakan untuk menguji transparansi dengan berfokus pada kemudahan dalam mendapatkan informasi keuangan untuk melihat sejauh mana pemerintah provinsi bersikap transparan atas informasi-informasi

keuangan yang dipublikasikan via *website*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah via *website*.

Berdasarkan uraian diatas dan dengan adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan kompleksitas pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via *Website* (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website?
3. Apakah kompleksitas pemerintah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah membuktikan secara empiris efektivitas pengaruh berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Pendapatan asli daerah terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website.
2. Belanja daerah terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website.
3. Kompleksitas pemerintah terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan via website.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Sebagai sarana memperluas wawasan dan menambah pengetahuan terkait transparansi informasi keuangan daerah di Indonesia.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi tambahan untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi yang memantau transparansi laporan keuangan daerah.

## 3. Bagi Akademisi

Untuk memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan dan memberikan edukasi terhadap ilmu pengetahuan ke depannya khusus terhadap ilmu akuntansi.

## 4. Bagi Praktisi

- a. Memberikan analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi transparansi laporan keuangan daerah.
- b. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan transparansi laporan keuangan.